

JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di Indonesia: Literature Review

The Quality of Social Rehabilitation Services for People with Mental Disorders in Indonesia: Literature Review

Any Wijayanti^{1,3*}, Rosyidah², Heni Trisnowati²

¹Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

²Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

³Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Indonesia

Article Info

Article History

Received: 25 Jul 2025

Revised: 08 Nov 2025

Accepted: 17 Nov 2025

ABSTRACT / ABSTRAK

People with Mental Disorders (ODGJ) are a vulnerable group that requires comprehensive support through social rehabilitation. In Indonesia, access to these services continues to face numerous challenges, including limited resources and strong societal stigma. This study employed a literature review method guided by the PRISMA framework and used a qualitative. Articles were sourced from PubMed and Google Scholar using the keywords: "social rehabilitation," "ODGJ," "service quality," "public health," and "mental health." After screening the titles and abstracts, 25 articles were selected for review. The results indicate that effective rehabilitation services are characterized by a holistic and individualized approach, cross-sectoral collaboration, and continuous evaluation and feedback. The main challenges include limited funding, a shortage of professional personnel, and prevailing social stigma. The rehabilitation strategy is implemented in stages, including intake, assessment, skills training, evaluation, and resocialization. This literature study can serve as a foundation for developing comprehensive and dignified social rehabilitation services for people with mental disorders by involving a multidisciplinary approach, policy support, and active participation from families and communities.

Keywords: Social Rehabilitation, People with Mental Disorders, Service Quality, Public Health, Mental Health.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Di Indonesia, akses terhadap layanan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga stigma sosial yang kuat di masyarakat. Metode literature review dengan panduan PRISMA dan menggunakan pendekatan kualitatif. Artikel diperoleh dari Pubmed dan Google Scholar. Selanjutnya dilakukan dengan kata kunci "rehabilitasi sosial", "ODGJ", "kualitas pelayanan"; "Kesehatan masyarakat", "kesehatan mental". screening judul serta abstrak didapatkan 25 artikel untuk direview. Hasil Menunjukkan pelayanan rehabilitasi yang efektif ditandai oleh pendekatan holistik dan individualisasi, keterlibatan lintas sektor, serta evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Tantangan utama meliputi keterbatasan dana, minimnya tenaga profesional, serta stigma sosial sebagai strategi rehabilitasi bertahap yang mencakup intake, asesmen, pelatihan keterampilan, evaluasi, dan resosialisasi. Studi literature ini dapat menjadi dasar dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi ODGJ yang harus dilakukan secara komprehensif dan bermartabat dengan melibatkan pendekatan multidisipliner, dukungan kebijakan, serta partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Kata kunci: Rehabilitasi Sosial, Odgj, Kualitas Pelayanan, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Jiwa

Corresponding Author:

Name : Any Wijayanti

Affiliate : Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Address : Jl. Prof.DR.Soepomo Sh, Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email : Anyw93@gmail.com

PENDAHULUAN

Gangguan kesehatan mental kini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem kesehatan global. Menurut World Health Organization (WHO, 2019), lebih dari 264 juta orang di dunia mengalami depresi, 45 juta mengalami gangguan bipolar, 50 juta menderita demensia, dan 20 juta hidup dengan skizofrenia. Meskipun jumlah penderita skizofrenia relatif lebih rendah dibandingkan jenis gangguan mental lainnya, National Institute of Mental Health (NIMH) menyebutkan bahwa skizofrenia termasuk dalam lima belas penyebab utama kecacatan global. Kondisi ini menandakan bahwa gangguan mental, terutama gangguan berat seperti skizofrenia, tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang besar bagi negara.(Usraleli et al., 2020).

Secara global, isu kesehatan mental semakin menonjol akibat meningkatnya tekanan hidup modern, krisis sosial-ekonomi, serta perubahan gaya hidup yang memicu stres kronis dan isolasi sosial. Pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi tersebut dengan meningkatkan angka depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma di berbagai negara. WHO (2022) menyoroti bahwa hanya sekitar 2% dari anggaran kesehatan nasional di banyak negara berkembang yang dialokasikan untuk kesehatan jiwa — sebuah kesenjangan serius dalam sistem pelayanan publik.

Selain itu, stigma sosial terhadap penderita gangguan jiwa masih menjadi hambatan besar. Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi masalah diskriminasi terhadap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), yang berakibat pada rendahnya akses terhadap perawatan dan layanan rehabilitasi. Di tingkat global, Mental Health Atlas (WHO, 2021) menegaskan perlunya pendekatan berbasis komunitas dan peningkatan integrasi layanan kesehatan mental dalam sistem kesehatan primer.

Di Indonesia, gangguan jiwa menjadi masalah sosial yang kompleks dengan dimensi biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Menurut Kementerian Kesehatan (Riskesdas, 2018), prevalensi ODGJ berat mencapai 7 per 1.000 penduduk, dan sebagian besar tidak mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai. Berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, stigma masyarakat, serta minimnya dukungan sosial memperparah situasi tersebut. Masalah ini diperparah oleh ketimpangan akses layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta terbatasnya tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Banyak keluarga dengan anggota ODGJ tidak mampu menyediakan perawatan yang layak karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang penanganan yang tepat. Akibatnya, sebagian penderita dibiarkan tanpa perawatan atau bahkan mengalami praktik pemasungan yang masih ditemukan di sejumlah daerah.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum dan kebijakan yang jelas, antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kedua peraturan ini menegaskan hak ODGJ untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, rehabilitasi, serta perlindungan sosial yang layak. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal kualitas pelayanan rehabilitasi sosial. Banyak lembaga rehabilitasi sosial, baik milik pemerintah maupun swasta, belum memiliki standar mutu layanan yang konsisten. Selain itu, belum banyak penelitian yang meninjau secara mendalam bagaimana kualitas layanan rehabilitasi sosial memengaruhi proses pemulihan dan reintegrasi sosial ODGJ.

Beberapa celah penelitian yang masih belum terisi antara lain kurangnya kajian komprehensif mengenai kualitas layanan rehabilitasi sosial ODGJ di Indonesia, khususnya di tingkat daerah atau shelter sosial, minimnya penelitian berbasis evaluasi yang mengukur efektivitas program rehabilitasi sosial dalam meningkatkan fungsi sosial dan kemandirian ODGJ, belum adanya integrasi data nasional terkait outcome rehabilitasi sosial — seperti tingkat pemulihan, reintegrasi sosial, atau kemandirian ekonomi pascarehabilitasi, aspek persepsi ODGJ dan keluarganya terhadap layanan yang diterima juga masih jarang dieksplorasi, padahal hal ini penting untuk menilai kepuasan dan keberlanjutan layanan, kurangnya analisis terhadap peran sumber daya manusia, stigma sosial, dan akses layanan sebagai faktor determinan keberhasilan program rehabilitasi sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, review ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi ODGJ, dengan menyoroti bentuk dan strategi pelayanan rehabilitasi sosial yang diterapkan di tingkat local, persepsi ODGJ dan keluarganya terhadap layanan yang diberikan dan efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dari aspek sumber daya, stigma sosial, dan aksesibilitas layanan.

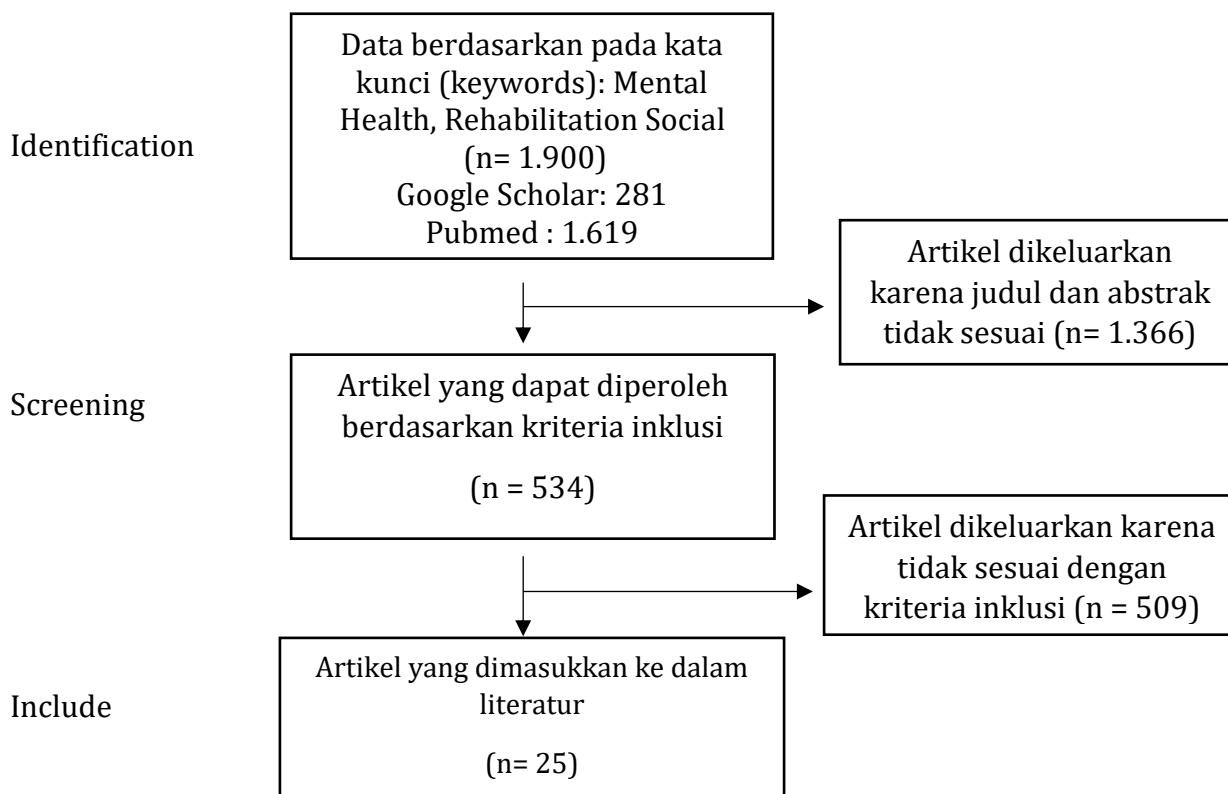
Tujuan utama dari review ini adalah memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan model pelayanan rehabilitasi sosial yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis kebutuhan penerima manfaat. Dengan demikian, hasil review ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi sosial dalam memperkuat sistem rehabilitasi sosial ODGJ di Indonesia sehingga dapat membantu ODGJ untuk meningkatkan fungsi sosial mereka dengan lebih baik dan diharapkan ODGJ mampu mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai baik mental maupun sosial.

BAHAN DAN METODE

Penelusuran artikel mengenai peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi ODGJ di Indonesia diperoleh dari Pubmed dan Google Scholar tahun 2020 – 2025 sejumlah 1900 artikel dengan kata kunci rehabilitasi sosial, orang dengan gangguan jiwa, kualitas pelayanan, kesehatan masyarakat, kesehatan jiwa. dan artikel menggunakan Bahasa Inggris serta Bahasa Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengecekan duplikasi apakah ada duplikasi atau tidak. Setelah artikel dilakukan pengecekan duplikasi dan dikeluarkan, didapatkan 534 artikel yang kemudian dilakukan screening judul serta abstrak sehingga didapatkan 25 artikel yang sesuai dengan materi terkait antara lain kualitas pelayanan pada Orang dengan Gangguan Jiwa, Rehabilitasi Sosial dan pelayanan Kesehatan jiwa yang dipublikasikan pada tahun 2020 hingga 2025 berupa literature review dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Berikut diagram PRISMA dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan hasil telaah dari 25 sumber literatur, diperoleh pemahaman komprehensif mengenai berbagai bentuk pelayanan, rehabilitasi, dan penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di berbagai wilayah dan institusi di Indonesia dan internasional. Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental atau ODGJ harus sesuai dengan pendekatan holistik dalam proses pemulihan ODGJ dan lebih menekankan pentingnya pendekatan individual dan kerjasama lintas sektor dalam rehabilitasi. Evaluasi dan pengumpulan umpan balik rutin dari pengguna layanan juga dapat menjamin keberlanjutan program sehingga akses layanan, pendekatan terkoordinasi, dan layanan yang dipersonalisasi. Kemudian sudut pandang pengguna layanan dan profesional kesehatan mental sangat penting

untuk meningkatkan mutu layanan. Sehingga secara keseluruhan, literatur-literatur ini memperlihatkan bahwa upaya penanganan dan rehabilitasi ODGJ memerlukan pendekatan multidisipliner, koordinasi lintas sektor, dukungan keluarga dan masyarakat, serta kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan agar pelayanan yang diberikan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pasien secara menyeluruh dan bermartabat.



Gambar 1. Diagram PRISMA

HASIL

Proses pencarian literatur menghasilkan sejumlah jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik kualitas layanan rehabilitasi sosial untuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sebanyak 25 artikel utama telah ditemukan dan dianalisis secara mendetail dengan menggunakan kriteria inklusi yang mencakup periode publikasi dari tahun 2020 hingga 2025, serta fokus pada studi empiris dan kajian konseptual yang relevan dengan layanan rehabilitasi sosial. Dari segi metodologi, sebagian besar artikel menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara melakukan wawancara dan observasi terhadap penerima layanan dan pekerja sosial untuk menilai efektivitas serta kepuasan layanan. Dalam hal lokasi penelitian, artikel yang telah ditinjau meliputi konteks nasional (Indonesia) serta internasional, seperti studi di India, Malaysia, dan beberapa negara di Eropa yang menekankan strategi rehabilitasi sosial yang berbasis komunitas. Temuan-temuan dari kajian tersebut menunjukkan pola tematik yang serupa, yaitu bahwa kualitas dari layanan rehabilitasi sosial sangat dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia, stigma sosial, dukungan dari keluarga, dan aksesibilitas terhadap layanan. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar sektor

antara lembaga sosial, kesehatan, dan komunitas lokal dalam memperkuat pemulihan fungsi sosial ODGJ.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Literature Review

No	Judul Artikel / Jurnal	Penulis & Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojo	(Chisnullah & Meirinawati, 2022)	Kualitatif	Layanan memenuhi 5 dimensi SERVQUAL: tangible, empathy, reliability, responsiveness, assurance. Hasil tersebut dilakukan di Kabupaten Jombang
2	Pelayanan Sosial terhadap ODGJ di Yayasan Hikmah Syahadah	(Hasanah, 2020)	Kualitatif	Pelayanan mencakup registrasi, pengasramaan, kesehatan, pelatihan, konseling, dan resosialisasi. Hasil tersebut dilakukan di pelayanan sosial kabupaten Tangerang
3	Analisis Pelayanan Rehabilitasi Eks Psikotik	(Sari & Museliza, 2023)	Kualitatif	Perluasan metode rehabilitasi, pendekatan individu, evaluasi berkala dan kerja sama lintas sektor pada UPT Bina Laras Riau
4	What matters for evaluating the quality of mental healthcare? Identifying important aspects in qualitative focus groups with service users and frontline mental health professionals	(Powell & Rowen, 2022)	Kualitatif (fokus grup)	Identifikasi 6 tema layanan: akses, manfaat, koordinasi, personalisasi, dan peran pemberi layanan, hal ini merupakan hasil dari UK NHS Trust
5	Evaluation of the Health Care System for People with Mental Health Disorder at the Panjang Inpatient Health Center Bandar Lampung City	(Fandri et al., 2022)	Kualitatif (studi kasus)	Dana, SDM, dan sarpras tidak mencukupi; output belum capai target pelayanan ODGJ pada Puskesmas Panjang
6	Pengalaman Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Paska Pasung Dalam Melakukan Rehabilitasi Psikososial	(Nurillawaty et al., 2019)	Kualitatif	Rendah diri sebagai respon awal rehabilitasi psikososial paska pasung, peningkatan kemampuan menjalani kehidupan sehari-hari selama rehabilitasi psikososial, peningkatan potensi diri sebagai hasil rehabilitasi psikososial, dan kemampuan aktualisasi diri paska rehabilitasi psikososial dihasilkan pada Panti Sosial Pala Martha Kota Sukabumi
7	Penerimaan Masyarakat pada Penderita Gangguan Jiwa wilayah kerja UPTD Puskesmas Bendo	(Setiawan & Koswara, 2019)	Kualitatif	Masyarakat tidak memberi perhatian yang cukup kepada individu dengan gangguan mental. Perhatian yang ada sering kali tidak pantas, dan mereka masih belum sepenuhnya diterima. Beberapa orang berpikir bahwa stres mental atau hal mistis bisa menjadi penyebab gangguan ini. Ada juga yang beranggapan

				kurangnya pengetahuan menjadi faktor. Meski begitu, masyarakat ingin agar individu dengan gangguan mental dapat kembali berinteraksi dan mendapatkan perhatian profesional untuk pemulihan. Namun, keberadaan mereka sering membuat orang lain merasa tidak nyaman.
8	Kinerja Dinas Sosial dalam Penanganan ODGJ di Hulu Sungai Utara	(Rusadi et al., n.d.)	Kualitatif deskriptif	Kinerja cukup baik; aspek efektivitas dan efisiensi masih perlu ditingkatkan. Hasil tersebut dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara
9	Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi ODGJ di Kota Bekasi	(Marbun et al., 2023)	Kualitatif	Yayasan Galuh sukses bermitra dengan Dinsos; masih ada tantangan lapangan pada kota Bekasi.
10	Pelayanan Sosial berbasis Panti bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa	(Putri & Nulhaqim, 2023)	Kualitatif	Pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti, menjadi sebuah cara agar orang yang mengalami gangguan jiwa dapat kembali menjalankan keberfungsian sosial serta memberikan edukasi kepada keluarga serta masyarakat.
11	Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia	(Wahyuni et al., 2021)	Kualitatif	Rehabilitasi sosial terdiri dari lima langkah. Pertama, penelusuran ODGJ di lapangan. Kedua, evaluasi untuk mengidentifikasi gejala. Ketiga, persiapan intervensi dengan memisahkan yang bersedia dan tidak. Keempat, intervensi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, tempat tinggal, alat bantu, kesehatan, dan bimbingan dalam berbagai aspek. Terakhir, resosialisasi dengan mengembalikan ODGJ yang dapat mengingat keluarganya, ini dilakukan di kota surakarta
12	Stigma terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Bali	(Herdiyanto et al., 2017)	Kualitatif	stigma yang diterima oleh ODGJ dan anggota keluarganya memengaruhi pengobatan medis yang dilakukan untuk memulihkan kondisi ODGJ. Semakin sedikit stigma yang diterima, semakin cepat dan berkelanjutan pengobatan medis yang dilakukan.
13	Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Kepulauan Talaud	(Tetti Solehati , Dinar Indriani , Ruth Jamlay, 2024)	Kualitatif	Pandangan masyarakat tentang penyebab gangguan mental, pandangan negatif masyarakat terhadap individu dengan gangguan mental, pandangan positif terhadap individu tersebut, dan sikap masyarakat secara keseluruhan dapat mempengaruhi individu dengan gangguan mental, tergantung pada

				sifatnya, baik positif maupun negatif. Stigma tidak hanya dialami oleh individu tersebut, tetapi juga oleh keluarga mereka. Edukasi sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gangguan mental.
14	Peran Dukungan Sosial keluarga dalam proses penyembuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	(Dewi & Nurchayati, 2021)	Kualitatif	bahwa dukungan sosial keluarga yang diberikan yaitu berupa dukungan emosional, dukungan informatif, dukungan instrumental serta dukungan penilaian sebagai penghargaan kepada ODGJ. Dukungan sosial yang diberikan keluarga kepada ODGJ tersebut membantu ODGJ mengalami kemajuan atau perubahan positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya dukungan sosial keluarga memberikan dampak positif yang dapat membantu proses penyembuhan ODGJ.
15	Gambaran Sikap Dan Dukungan Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kecamatan Kartasura	(Bott, 2014)	Kualitatif	(1) Sikap keluarga secara kognitif terhadap penderita gangguan jiwa adalah sebagian besar baik, (2) Sikap keluarga secara afektif terhadap penderita gangguan jiwa adalah sebagian besar baik, (3) Sikap Keluarga secara kecenderungan untuk bertindak terhadap penderita gangguan jiwa adalah baik, (4) Dukungan keluarga yang diberikan yaitu terdiri dari (a) dukungan informasional (b) dukungan penilaian (c) dukungan instrumental (d) dukungan emosional. Dukungan tersebut semuanya baik. (5) Sikap dan dukungan keluarga
16	Tinjauan Pelaksanaan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Puskesmas Buhit Kabupaten Samosir	(Taruli Rohana Sinaga et al., 2022)	Kualitatif	bahwa penanganan ODGJ di Puskesmas Buhit belum maksimal disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan jiwa, kurangnya pelatihan peningkatan keterampilan penanganan ODGJ bagi petugas kesehatan, alat kesehatan belum tersedia, sertain rumah singgah yang belum ada
17	Peran Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ kecamatan Polewali Mandar	(Tenri, 2021)	Kualitatif	Dinas Sosial telah aktif dalam membantu orang dengan masalah kesehatan jiwa di Polewali dengan memberikan dukungan berupa makanan dan obat-obatan. Kontribusi mereka tercatat mengalami peningkatan, meskipun jumlah

				penerima bantuan tidak terlalu banyak. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi di Polewali Mandar bagi ODGJ untuk dapat memperbaiki diri, serta belum adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang ODGJ.
18	Penerimaan Masyarakat pada penderita gangguan Jiwa	(Setiawan & Koswara, 2019)	Kualitatif	<p>Penelitian menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap orang dengan gangguan mental cenderung tidak memperhatikan penderita. kepedulian terhadap mereka masih sedikit. perlakuan tidak manusiawi sering terjadi. masyarakat belum sepenuhnya menerima mereka. stres emosional dan pengaruh makhluk halus dianggap sebagai penyebab gangguan. kurangnya pengetahuan juga dilihat sebagai penyebab. ada harapan agar penderita bisa kembali berinteraksi. pentingnya perhatian tenaga kesehatan untuk pemulihan mereka. masyarakat merasa tidak nyaman dengan mereka dan perlu edukasi tentang gangguan mental agar lebih menghargai dan memperlakukan mereka secara manusiawi.</p>
19	Peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi orang gangguan kesehatan jiwa ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang gangguan kesehatan jiwa di Kota Padangsidempuan	(Siregar, 2023)	Kualitatif	<p>Upaya Dinas Sosial Padangsidempuan dalam Merehabilitasi ODGJ di Kota Padangsidempuan belum semua mendapatkan rehabilitasi sehingga ODGJ di kota Padangsidempuan masih banyak yang belum di rehabilitasi adapun beberapa tahap-tahapan yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu: Melakukan operasi simpatik enam bulan sekali di wilayah kecamatan/desa atau mendapatkan klien odgj dari kiriman warga, Identifikasi Klien ODGJ, Pembinaan Dan Pelatihan Terhadap ODGJ di Rumah Sakit Jiwa Ildrem Medan, dikembalikan ke pihak keluarga</p>
20	Persepsi Masyarakat Di Sekitar Rumah Singgah Tentang Perawatan Pasien Gangguan Jiwa	(Pustaka Ah Yusuf, 2020)	Kualitatif	<p>Terhadap ODGJ tidak hanya berdampak pada keluarga dan ODGJ itu sendiri melainkan pada pola pengasuhan dan perawatan ODGJ.</p>
21	Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengobatan	(Oktaviana & Ratnawati, 2022)	Kualitatif	<p>bahwa mayoritas keluarga memberikan dukungan berupa dukungan secara emosional (empati</p>

	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)			dan peduli), instrumental (bantuan biaya, bantuan jasa, bantuan waktu) dan pemantauan minum obat kepada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Mayoritas keluarga mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan meliputi kunjungan rutin untuk dilakukan penyuntikan dan pemberian obat, serta pemantauan kepada pasien.
22	Implementasi Program Kesehatan Jiwa Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wilayah Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2024	(Elmi Astrabel, 2025)	Kualitatif	Program kesehatan jiwa di kedua puskesmas memiliki komunikasi yang baik. Namun demikian, P2 perlu meningkatkan kegiatan edukasi, promosi kesehatan jiwa, dan koordinasi lintas sektor. Meskipun SDM di kedua puskesmas memadai, Kerjasama di P2 antara penanggung jawab Kesehatan jiwa dan petugas promosi kesehatan perlu ditingkatkan. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) diperlukan untuk kedua puskesmas terutama untuk petugas promosi kesehatan dan kader kesehatan
23	Peran stakeholder terhadap program kesehatan jiwa dalam penanggulangan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kecamatan Moyudan kab Sleman	(Syifa Atun Nisa et al., 2020)	Kualitatif	Seluruh stakeholder telah berperan dalam program kesehatan jiwa dalam upaya penanggulangan pasung pada ODGJ. Advokasi yang dilakukan stakeholder kunci yaitu puskesmas berupa komitmen politik dari pemerintah daerah, dukungan kebijakan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Jiwa Grahasia, Kecamatan Moyudan dan Pemerintah Desa
24	Kualitas Pelayanan Program Posyandu Jiwa Terhadap Pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) di Desa Mojotamping Kabupaten Mojokerto	(Adiwinoto & Oktariyanda, 2021)	Kualitatif	kualitas pelayanan program Posyandu Jiwa terhadap Pasien ODGJ di Desa Mojotamping Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan cukup bagus, hanya saja sedikit kurang dari segi lokasi, ruang tunggu dan ruang proses perawatan yang terbilang cukup sempit dan kebersihan yang kurang karena kondisi lingkungan yang rata – rata berdebu
25	Collaborative Governance Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Medan	(Siburian & Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, 2025)	Kualitatif	bahwa collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Medan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kejelasan mengenai regulasi dan tugas fungsi yang harus dilakukan Selama ini dalam

penanganan skizofrenia di Kota Medan, kedua Dinas selalu melakukan tugasnya secara mandiri atau masing-masing instansi. Belum terjalinnya kerjasama dengan baik antar kedua Dinas tersebut

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai artikel ilmiah, pelayanan rehabilitasi sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) umumnya memiliki pola dan tahapan yang serupa, dimulai dari proses registrasi (intake), asesmen psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga tahap bimbingan, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial. Bentuk layanan tersebut mencakup pemberian kebutuhan dasar (makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan), pendampingan psikologis dan konseling, serta pelatihan vokasional untuk meningkatkan kemandirian. Layanan rehabilitasi ini diselenggarakan oleh berbagai lembaga, baik milik pemerintah (dinas sosial, puskesmas, rumah sakit jiwa, shelter) maupun lembaga swasta dan keagamaan. Setiap tahap memiliki fungsi yang berkesinambungan: tahap intake dan asesmen berfokus pada identifikasi kebutuhan dan kondisi individu, tahap bimbingan dan pelatihan diarahkan untuk pemulihan fungsi sosial dan emosional, sementara tahap resosialisasi menjadi proses penting bagi ODGJ untuk kembali beradaptasi dalam lingkungan masyarakat. Namun, hasil review menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan rehabilitasi di banyak daerah masih belum merata. Keterbatasan fasilitas seperti poli jiwa, ruang konseling, serta ketersediaan obat psikiatri sering menghambat kelancaran layanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sarana dan tenaga profesional menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan layanan rehabilitasi berjalan efektif.

Pendekatan rehabilitasi sosial bagi ODGJ yang paling banyak diadopsi adalah pendekatan holistik dan multidisipliner yang menggabungkan dimensi medis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan gejala medis, tetapi juga memperhatikan pemulihan makna hidup, relasi sosial, dan dukungan emosional pasien. Pentingnya kerja sama antara tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas merupakan bagian penting dalam strategi holistik yang menunjukkan bahwa dukungan emosional dan keterlibatan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan rehabilitasi. Selain itu, aspek spiritualitas berperan dalam memperkuat ketenangan batin dan motivasi pemulihan pasien. Pendekatan berbasis nilai agama atau pesantren sosial juga terbukti membantu menurunkan stigma serta memperkuat dukungan sosial bagi ODGJ.

Berbagai penelitian mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam implementasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi ODGJ di antaranya keterbatasan anggaran dan fasilitas untuk menunjang kegiatan rehabilitasi, termasuk kekurangan ruang perawatan dan sarana pendukung, kekurangannya tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam kesehatan jiwa, baik di tingkat puskesmas maupun lembaga sosial. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap ODGJ yang dapat menghambat proses pemulihan dan partisipasi sosial, kurangnya koordinasi antar instansi yang menyebabkan tumpang tindih program serta belum optimalnya

sinergi antara Dinas sosial dan Dinas Kesehatan dan keterbatasan sistem pemantauan dan evaluasi, sehingga sulit mengukur efektivitas program secara komprehensif dan berbasis data.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas lembaga, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengurangan stigma melalui edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Dari hasil telaah berbagai artikel, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial ODGJ antara lain meliputi keterlibatan keluarga dan masyarakat, yang memberikan dukungan emosional, instrumental, dan sosial secara berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor khususnya antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal dalam memastikan kesinambungan program, evaluasi dan monitoring berkala untuk menilai efektivitas program serta melibatkan pengguna layanan dalam umpan balik, pendidikan dan promosi kesehatan jiwa yang dilakukan di fasilitas layanan primer seperti puskesmas. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada kualitas layanan formal, tetapi juga pada dukungan sosial yang luas dan keberlanjutan program di tingkat komunitas.

Sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan layanan rehabilitasi sosial bagi ODGJ membutuhkan pendekatan kebijakan yang sistemik dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dengan menekankan pada peningkatan alokasi anggaran daerah untuk program rehabilitasi sosial dan kesehatan jiwa, pengembangan pelatihan profesional pekerja sosial dan tenaga kesehatan jiwa, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) terpadu lintas sektor untuk memastikan koordinasi yang efektif antara instansi, penguatan layanan berbasis komunitas dan integrasi program pencegahan, rehabilitasi, serta resosialisasi dan peningkatan kampanye publik untuk mengurangi stigma terhadap ODGJ dan keluarganya. Pendekatan kebijakan yang sistemik ini perlu diimbangi dengan evaluasi berbasis bukti (evidence-based policy) agar intervensi yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial ODGJ secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis artikel yang diteliti, bisa disimpulkan bahwa layanan rehabilitasi sosial untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia umumnya telah meliputi langkah-langkah penting seperti pendaftaran, penilaian psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar, konseling, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi. Layanan ini fokus pada pemulihan fungsi sosial serta peningkatan kemandirian ODGJ agar mereka dapat kembali beradaptasi di masyarakat. Pendekatan rehabilitasi yang berhasil adalah pendekatan menyeluruh dan melibatkan berbagai disiplin, yang mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan spiritual, serta dukungan dari berbagai sektor termasuk tenaga kesehatan, pekerja sosial, lembaga pemerintah, dan keluarga.

Walaupun demikian, pelaksanaan program rehabilitasi sosial masih menghadapi banyak tantangan struktural, di antaranya keterbatasan dana, kurangnya profesional, minimnya fasilitas yang mendukung, stigma sosial terhadap ODGJ, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Faktor-faktor ini menyebabkan perbedaan kualitas layanan di berbagai daerah dan berdampak pada keberhasilan program. Di sisi lain, keberhasilan rehabilitasi sangat

bergantung pada dukungan dari keluarga dan masyarakat, kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan, dan pelaksanaan evaluasi serta pemantauan yang berbasis bukti. Untuk itu, peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial untuk ODGJ memerlukan kebijakan yang terpadu dan dukungan lembaga yang kuat sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas layanan.

Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperkuat implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental melalui peningkatan dukungan anggaran, penyediaan tenaga ahli, serta penyusunan prosedur operasional standar yang terintegrasi lintas sektor agar pelaksanaan rehabilitasi sosial dapat berjalan lebih efisien dan merata. Pada tingkat pelaksana, dinas sosial dan instansi terkait diharapkan memperluas model layanan berbasis komunitas dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan organisasi sosial dalam pendampingan berkelanjutan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Upaya ini perlu ditunjang melalui peningkatan pelatihan keterampilan dan edukasi kesehatan mental di tingkat desa atau kelurahan guna memperkuat kemandirian serta integrasi sosial ODGJ. Di sisi lain, tenaga profesional dan lembaga rehabilitasi perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkesinambungan terkait aspek psikososial dan manajemen layanan, serta melakukan penilaian dan pengumpulan umpan balik secara rutin untuk menjamin mutu dan kepuasan penerima manfaat. Selain itu, akademisi dan peneliti diharapkan melakukan kajian lanjutan berbasis evaluasi program dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif untuk menghasilkan model rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif, terukur, dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinoto, D. S., & Oktariyanda, T. A. (2021). Kualitas Pelayanan Program Posyandu Jiwa Terhadap Pasien Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Di Desa Mojotamping Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 53–68. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p53-68>
- Bott, R. (2014). Gambaran Sikap dan Dukungan Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa. *Igarss* 2014, 1, 1–5.
- Chisnullah, M. R., & Meirinawati, M. (2022). Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot). *Publika*, 937–952. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p937-952>
- Dewi, O. I. P., & Nurchayati. (2021). Peran dukungan sosial keluarga dalam proses penyembuhan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). *Character: Jurnal Penelitian Psikologi Proses*, 8(1), 99–111.
- Elmi Astrabel. (2025). Implementasi Program Kesehatan Jiwa Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wilayah Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2024. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*, 15(02), 189–198. <https://doi.org/10.36569/jmm.v15i02.414>
- Fandri, M. Y., Sary, L., & Ekasari, F. (2022). Evaluation of the Health Care System for People with Mental Health Disorder at the Panjang Inpatient Health Center Bandar Lampung City. *Malahayati Nursing Journal*, 4(7), 1927–1944. <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i7.6343>
- Hasanah, U. (2020). Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Yayasan Hikmah Syahadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang. *UIN SYarif Hidayatullah* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1492869>

- Herdiyanto, Y. K., Tobing, D. H., & Vembriati, N. (2017). Stigma Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Bali. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(2), 121–132. <https://doi.org/10.51353/inquiry.v8i2.148>
- Lestari, W. I. S., Artadi, M. W. B., Wafiroh, Z. N., & Febriansyah, F. I. (2023). Empowerment of People with Mental Disorders (ODGJ) in Increasing Income Through Creativity in Making Doormats (Case Study of Poskeswa in Sidorejo, Sukorejo District, Ponorogo Regency). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 2(9), 769–780. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v2i9.6083>
- Marbun, E. M., Nida, Q., & Juwandi, R. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilit. 7, 149–160.
- Nurillawaty, A., Daulima, N. Hcr., & Wardhani, I. Y. (2019). Pengalaman Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Paska Pasung Dalam Melakukan Rehabilitasi Psikososial. *Journal of Nursing and Health*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.25099/jnh.vol2.iss1.21>
- Oktaviana, M., & Ratnawati, R. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(02), 170–176. <https://doi.org/10.33221/jikm.v11i02.1091>
- Powell, P. A., & Rowen, D. (2022). What Matters for Evaluating the Quality of Mental Healthcare? Identifying Important Aspects in Qualitative Focus Groups with Service Users and Frontline Mental Health Professionals. *Patient*, 15(6), 669–678. <https://doi.org/10.1007/s40271-022-00580-0>
- Pustaka Ah Yusuf, D. (2020). Persepsi Masyarakat Di Sekitar Rumah Singgah Tentang Perawatan Pasien Gangguan Jiwa Penelitian Kualitatif (Studi Fenomenologi). *Openjurnal.Unmuhpnk.Ac.Id*, 0–13. <https://repository.unair.ac.id/104672/>
- Putri, N. A. R., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pelayanan Sosial Berbasis Panti Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 5(1), 1–9.
- Rusadi, M., Arsyad, M., Hasbiyah, S., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (n.d.). Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 25–31.
- Sari, I. P., & Museliza, V. (2023). Analisis Pelayanan Rehabilitasi Bagi Penyandang Eks Psikotik Terlantar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 2(1), 101–109.
- Setiawan, L., & Koswara, G. I. (2019). Penerimaan Masyarakat Pada Penderita Gangguan Jiwa. *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 5(2). <https://doi.org/10.36053/mesencephalon.v5i2.147>
- Siburian, S. R., & Muhammad Imanuddin Kandias Saraan. (2025). Collaborative Governance Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Medan. *SAJJANA: Public Administration Review*, 3(01), 45–56. <https://doi.org/10.32734/sajjana.v3i01.20998>
- Siregar, A. M. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Gangguan Kesehatan Jiwa di Kota Padangsidimpuan.
- Syifa Atun Nisa, Mubasysyir Hasanbasri, & Nunung Priyatni. (2020). Peran Stakeholder Terhadap Program Kesehatan Jiwa Dalam Penanggulangan Pasung Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)*, 23(02), 58–67. <https://doi.org/10.22146/jmpk.v23i02.4180>

- Taruli Rohana Sinaga, Jek Amidos Pardede, & Sri Dearmaita Purba. (2022). Jurnal Manager. Tinjauan Pelaksanaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Pukesmas Buhit Kabupaten Samosir, 4(1), 05–01.
- Tenri, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 6(2), 179. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2154>
- Tetti Solehati, Dinar Indriani, Ruth Jamlaay, V. F. L. & C. E. K. (2024). Jurnal Keperawatan Jurnal Keperawatan. Jurnal Keperawatan, 17(1), 153–164.
- Usraleli, U., Fitriana, D., Magdalena, M., Melly, M., & Idayanti, I. (2020). Hubungan Stigma Gangguan Jiwa dengan Perilaku Masyarakat Pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Karya Wanita Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 353. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.940>
- Wahyuni, A., Hartanto, R. V. P., & Nuryadi, M. H. (2021). Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta. Sosio Konsepsia, 11(1), 336–349. <https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2525>